RCEP Harus Diikuti Pembenahan Izin Usaha

Tanggal	: Selasa , 17 November 2020
Media	: Suara Pembaruan
Halaman	: 7
Wartawan	: O-2
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Rizal Calvary Marimbo *(Komite Investasi BKPM)*, Berly Martawardaya *(Ekonom Indef)*, Rosdiana Sijabat *(Ekonom Unika Atma Jaya Jakarta)*
Rubrik	: Ekonomi & Keuangan
Topik	: RCEP

RCEP Harus Diikuti Pembenahan Izin Usaha

[JAKARTA] Indonesia bisa banyak mendapatkan keuntungan dari perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) asal segera membenahi izin usaha dan daya saing bisnis.

Pernyataan tersebut disepakati Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rizal Calvary Marimbo, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, dan Ekonom Unika Atma Jaya Jakarta Rosdiana Sijabat kepada *SP*, Senin (16/11).

Rizal Calvary mengatakan, kemudahan berusaha merupakan hal yang penting karena ini menjadi sorotan utama bagi mitra dagang Indonesia. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, upaya percepatan dalam menjaga dan menarik investor justru semakin diperlukan. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi strategis dan berkualitas masuk ke Indonesia.

"Soal kemudahan usaha bagaimana bisa lebih baik, komprehensif, singkat, ringkas, ada kepastian dan ini semua yang lagi dibenahi setahun belakangan ini di BKPM. Ini semua supaya kita punya *bargaining* dengan mitra dagang kita," kata Rizal.

Jika merujuk pada peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, saat ini Indonesia berada di peringkat 73. Dari 11 indikator yang menjadi kajian dalam EoDB, ada beberapa hal yang masih harus Indonesia perbaiki, di antaranya memulai berusaha.

Berly Martawardaya mengatakan, untuk dapat manfaat optimal dari RCEP, maka Indonesia harus perbaiki dulu komponen-komponen yang masih rendah skornya di *competitiveness index*. Khususnya di kesehatan, labor skill dan infrastruktur dan ICT (*information and communications technology*). "Serta percepat perizinan usaha dan investasi," ucapnya.

Menurut Berly, dengan pembebasan tarif perdagangan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia paling memungkinkan merebut peluang investasi dari Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua dunia saat ini. RCEP untuk informasi merupakan kesepakatan dagang negara-negara anggota ASEAN serta lima mitra negara eksternalnya, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru yang telah diteken para menteri perdagangan dan disaksikan para kepala negara anggota, di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11).

"Magnet utama memang masih Tiongkok, tetapi sekarang banyak perusahaan multinasional menghindari *excess exposure*, agar jangan sampai hanya berinvestasi di satu negara, sehingga tidak terlalu terpengaruh jika ada *country specific shocks*," ujar Berly.

Terkait barang dari 14 negara lain yang akan masuk dengan mudah, menurut Berly hal itu harus disikapi secara bijak, sehingga Indonesia tidak hanya jadi negara tujuan impor semata.

"Pola pikirnya jangan defensif bahwa produk negara lain akan masuk Indonesia. Namun, ofensif, bagaimana menarik investasi ke Indonesia dari negara RCEP dan negara Eropa plus Amerika karena produk-produk Indonesia bisa di ekspor ke negara-negara RCEP dengan tarif yang rendah. Tidak apa-apa impor meningkat asal investasi dan ekspor juga meningkat," kata Berly.

Daya Saing

Rosdiana Sijabat menilai, pemerintah harus meningkatkan daya saing ekspor produk nonmigas unggulan, produk manufaktur dan produk UMKM Indonesia. Kunci kemampuan Indonesia untuk mendapatkan *economic benefits* dari RCEP harus berasal dari daya saing produk tersebut.

Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekspor Indonesia ke 15 negara yang meratifikasi RCEP mencapai 7%, dengan adanya RCEP, maka peluang untuk meningkatkan ekspor lebih dari dua digit. Peluang ini tersedia, karena 15 negara yang menyepakati RCEP berkontribusi sekitar 32% PDB global dan 27% perdagangan internasional. "Kunci meningkatkan daya saing, terutama produk nonmigas dan manufaktur adalah implementasi dan konsistensi kebijakan khusus yang dapat menekan biaya produksi produksi nonmigas, manufaktur dan UMKM seperti subsidi energi secara konsisten," ujar Rosdiana. [O-2]